

**PERAN *STAKEHOLDER* DALAM PENGELOLAAN TAMAN WISATA
ALAM GUNUNG TUNAK KABUPATEN LOMBOK TENGAH
The Role Of Stakeholders In The Management Of Mount Tunak Natural
Tourism Park, Central Lombok District**

Muhamad Ari Rahman^{1*}, Hairil Anwar², Endah Wahyuningsih³
^{1,2,3}Universitas Mataram, Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram
*Email:

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi *stakeholder* dan perannya, mengetahui pengaruh dan kepentingan masing-masing *stakeholder* dan mengetahui pola yang dikembangkan antara *stakeholder* dalam pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, penentuan responden menggunakan metode *purposive sampling* dengan analisis data menggunakan analisis *stakeholder*. Hasil penelitian ini yaitu aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB), Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah, Korea – Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC), Pemerintah Desa Mertak dan Kelompok Tunak Besopoq. Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) dan *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) memiliki kepentingan dan pengaruh dengan kriteria sangat tinggi, Kelompok Tunaq Besopo memiliki kepentingan dan pengaruh dengan kriteria tinggi, Sedangkan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah dan Pemerintah Desa Mertak merupakan pihak yang memiliki tingkat kepentingan pengaruh yang rendah. Pola pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tunak bahwa pola pengelolaan yang dikembangkan oleh para aktor ada tiga yaitu pola partisipasi komunitas, pola *partnership* atau kemitraan dan pola pengembangan kapasitas lokal.

Kata kunci: Stakeholder, Pengaruh dan Kepentingan, Pola Pengelolaan, TWA Gunung Tanak

Abstract

This research aims to identify stakeholders and their roles, determine the influence and interests of each stakeholder and determine the patterns developed between stakeholders in managing the Gunung Tunak Nature Tourism Park area. The method used in this research is a descriptive method, determining respondents using a purposive sampling method with data analysis using stakeholder analysis. The results of this research are the actors involved in implementing the cooperation in managing the Gunung Tunak Nature Tourism Park, namely the West Nusa Tenggara Resource Conservation Center (BKSDA NTB), the Central Lombok Regency Tourism Office, the Central Lombok Regional Development Planning Agency (Bappeda), Korea - Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC), Mertak Village Government and Tunak Besopoq Group. The West Nusa Tenggara Resource Conservation Center (BKSDA NTB) and the Korea – Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) have interests and influence with very high criteria, the Tunaq Besopo Group has interests and influence with high criteria, while the Central Lombok Regency Tourism Office, the Planning Agency Central Lombok Regional Development

(Bappeda) and the Mertak Village Government are parties that have a low level of influence. The management pattern of the Gunung Tunak Natural Tourism Park area is that there are three management patterns developed by the actors, namely the community participation pattern, the partnership pattern and the local capacity development pattern.

Keywords; Stakeholder, The Influence and Interests, Management Patterns, TWA Gunung Tunak

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah salah satu sumber devisa negara yang memiliki andil besar serta potensial dalam membangun perekonomian negara. Perkembangan pariwisata tidak berkembang hanya di negara-negara saja, melainkan perkembangan pariwisata juga terjadi secara regional, seperti di Pulau Lombok. Potensi wisata di Pulau Lombok sangat beragam. Dimulai dari kekayaan alam pantai, gua, bukit, pegunungan, danau, hingga bentangan alam yang indah. Kekayaan alam Pulau Lombok ini yang menjadi daya pikat tersendiri baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dari sekian banyak potensi wisata alam yang menarik di Pulau Lombok, salah satu wisata alam yang terkenal adalah Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak. TWA Gunung Tunak merupakan kawasan pelestarian alam yang termasuk dalam 17 kawasan konservasi di Indonesia yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam. TWA Gunung Tunak terletak di Desa Mertak, Kecamatan Pujut Lombok Tengah dan dimanfaatkan sebagai lokasi parawisata dan rekreasi alam. TWA Gunung Tunak ditetapkan menjadi Taman Wisata berdasarkan SK Menhut No.425/Kpts-II/1996. Penetapan ini didasarkan atas beberapa hal, salah satu diantaranya ialah keunikan potensi flora dan fauna yang ditemukan di Gunung Tunak. Tipologi spesies tumbuhan yang ditemukan di TWA Gunung Tunak memiliki karakter khusus sebagai ciri khas tumbuhan peralihan dari habitat perairan dan habitat daratan.

Pengembangan wisata alam dalam bentuk ekowisata di Kawasan TWA Gunung Tunak diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat, yaitu terbukanya kesempatan kerja dan berusaha. Hal ini sesuai dengan pernyataan Beaumont (2011) melalui hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa ekowisata dapat membawa dampak positif berupa peningkatan ekonomi, konservasi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Akan tetapi, dalam pengembangan wisata TWA Gunung Tunak membutuhkan Kerjasama antara para pelaku sektor pariwisata yang bersifat terkoordinasi dan berjangka Panjang.

Program kerjasama stakeholder dengan TWA Gunung Tunak penting untuk dilakukan mengembangkan pariwisata sehingga dapat bermanfaat terhadap peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang terkait dalam bentuk kerjasama aktor yang terlibat adalah kurangnya kejelasan kepada masyarakat mengenai kerjasama yang dilakukan oleh para aktor atau stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan Taman Wisata Alam. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan oleh masyarakat serta masyarakat menganggap bahwa para investor hanya akan menguasai lahan tanpa melibatkan masyarakat sehingga terjadinya resistensi atau protes dari masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian terkait Peran *Stakeholder* dalam pengelolaan kawasan tersebut. Hal ini penting agar dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat dalam memberikan gambaran nyata di lapangan. Selain itu, peran stakeholder sangat penting diketahui untuk pengembangan kawasan wisata selanjutnya. Sehingga apabila suatu kawasan tersebut telah berkembang maka akan membawa pengaruh besar terhadap kondisi ekonomi yang juga akan menguntungkan stakeholder. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi *stakeholder* dan perannya, mengetahui pengaruh dan kepentingan masing-masing *stakeholder* dan mengetahui pola yang dikembangkan antara *stakeholder* dalam pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tunak..

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala atau hubungan dalam suatu masyarakat dengan mempelajari masalah – masalah yang ada sekarang berdasarkan data, dengan menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasikan data dan kemudian ditarik kesimpulan (Rukajat, 2018).

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 s/d September 2023 berlokasi di Taman Wisata Alam Gunung Tunak Kabupaten Lombok Tengah.

Objek dan Alat Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak dengan unit analisis : Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan TWA Gunung Tunak. Sedangkan Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa alat tulis, kuisioner wawancara dan kamera untuk mendokumentasikan penelitian.

Penentuan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi pada penelitian ini menggunakan metode *Purposive sampling* yaitu Teknik pemilihan daerah sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Taman Wisata Alam Gunung Tunak merupakan satu-satunya Taman Wisata Alam yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Taman Wisata Alam Gunung Tunak dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan mempunyai peluang yang besar untuk berkembang menjadi Objek Daya Tarik Wisata Alam di Pulau Lombok dikarenakan lokasi nya berdekatan dengan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika dan Pertamina Mandalika International Street Circuit.

Penentuan Responden

Responden yang dipilih pada tahap awal dalam penelitian ini dijadikan sebagai Responden Kunci. Penentuan Responden Kunci dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018).

Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang mengetahui terkait pengelolaan TWA Gunung Tunak, dalam hal ini adalah BKSDA NTB
2. Pihak yang mengelola TWA Gunung Tunak, dalam hal ini adalah `Masyarakat Tunak Besopq

Setelah melakukan wawancara tahap awal dengan Responden Kunci, responden selanjutnya akan diwawancarai berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Informan Kunci. Metode yang dimaksud ialah metode *Snowball Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dari sampel yang mulanya berukuran kecil menjadi sampel yang berukuran besar.

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2018).

2. Wawancara Terstruktur

Menurut (Sugiyono, 2010; Halim, *et.al* 2019), Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*) ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pada wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan sama, dan pengumpul data mencatatnya.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi yang dicari berisi tentang Kawasan Wisata Alam Gunung Tunak (TWA) Gunung Tunak, dan *stakeholder* yang berperan dalam pengelolaan TWA Gunung Tunak. Referensi ini dapat dicari melalui buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan situs-situs internet. Output dari studi literatur ini adalah terkoleksinya referensi yang relevan dengan perumusan masalah.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Variabel Penelitian

Tujuan	Variabel	Indikator
Mengetahui <i>stakeholder</i> yang berperan serta perannya dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak	Keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan TWA Gunung Tunak	1. Adanya dokumen kerjasama antara <i>stakeholder</i> dengan Taman Wisata Alam Gunung Tunak
Mengetahui kepentingan dan pengaruh masing-masing <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak	Kepentingan masing-masing <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan TWA Gunung Tunak	1. Persepsi model kerjasama pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. 2. Keterlibatan terhadap pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. 3. Program terkait pelaksanaan kerjasama pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak 4. Manfaat kerjasama pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak bagi pemangku kepentingan 5. Ketergantungan pemangku kepentingan terkait pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak

Tujuan	Variabel	Indikator
	Pengaruh masing-masing <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan TWA Gunung Tunak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan pemangku kepentingan dalam memperjuangkan aspirasinya terkait kerjasama pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak 2. Kontribusi fasilitas yang diberikan terkait pelaksanaan kerjasama pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak 3. Kapasitas kelembagaan/SDM yang ditugaskan dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak 4. Dukungan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kerjasama pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak 5. Kemandirian dalam pelaksanaan (Kebutuhan kerjasama) dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak

Pola pengelolaan dalam pengembangan kawasan TWA Gunung Tunak disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Variabel Pola Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak

Variabel	Indikator
Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen perencanaan kawasan b. Tahapan penyusunan perencanaan c. Lama perencanaan d. Keterlibatan aktor dalam perencanaan kawasan
Investasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Sumber anggaran b. Keterlibatan aktor dalam pembiayaan c. Jenis-jenis investasi d. Besar investasi yang diberikan
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya organisasi kelompok masyarakat b. Keterlibatan aktor dalam pelaksanaan c. Jenis-jenis pelaksanaan
Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Kolaborasi dengan pihak lain b. Keterlibatan aktor dalam pengelolaan c. Jenis program pengelolaan
Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Materi yang di evaluasi b. Waktu evaluasi c. Keterlibatan aktor dalam evaluasi

Pola pengelolaan wisata merupakan pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dan kontribusi aktor dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata. Keliwar *et al.* (2013), beberapa pola pengelolaan wisata yang umum digunakan ada enam yaitu Konservasi alam dan budaya, pendidikan dan kesadaran lingkungan, partisipasi komunitas, pemberdayaan ekonomi lokal, partnership dengan pihak eksternal, dan pengembangan kapasitas lokal.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis stakeholder sebagai instrument analisis utama. Analisis stakeholder merupakan suatu pendekatan dan prosedur untuk memperoleh pemahaman suatu sistem dengan cara mengidentifikasi aktor-aktor kuncinya atau stakeholdernya di dalam sistem tersebut, dan menilai kepentingan ekonomi mereka masing-masing di dalam sistem itu

(Suporahardjo, 2005).

1. Identifikasi Stakeholder Terlibat

Penelitian ini menggunakan analisis stakeholder sebagai instrument analisis utama untuk mengidentifikasi stakeholder terlibat. Analisis stakeholder merupakan suatu pendekatan dan prosedur untuk memperoleh pemahaman suatu sistem dengan cara mengidentifikasi aktor- aktor kuncinya atau stakeholdernya di dalam sistem tersebut, dan menilai kepentingan ekonomi mereka masing-masing di dalam sistem itu (Suporahardjo, 2005). Stakeholders atau pemangku kepentingan dalam penelitian ini merupakan Pemerintah, Swasta, dan Organisasi yang mengelola TWA Gunung Tunak. Untuk identifikasi aktor dapat menggunakan Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Identifikasi aktor terlibat dan peran dalam pengelolaan

Aktor	Peran
A	
B	
C	

2. Analisis Kepentingan dan Pengaruh

Analisis Kepentingan dan Pengaruh aktor yang terlibat mengacu pada tabel menurut (Ichsan *et al.*, 2017 *cit.* Reed *et al.*, 2009). Untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh dari setiap aktor-aktor yang terlibat dalam *stakeholder* dapat disajikan pada Tabel 4 dan 5 berikut.

Tabel 4. Tingkat Kepentingan Aktor

No	Pemangku Kepentingan	Kepentingan					Nilai
		K1	K2	K3	K4	K5	

Keterangan :

- K1 : Pemahaman akan konteks nilai-nilai penting yang dimiliki dari kawasan konservasi
- K2 : Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi
- K3 : Kontribusi fasilitas pendukung yang diberikan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi
- K4 : Program pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi
- K5 : Manfaat yang diterima pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi

Tabel 5. Tingkat Pengaruh Stakeholder

No	Pemangku Kepentingan	Pengaruh					Nilai
		P1	P2	P3	P4	P5	

Keterangan :

- P1 : Kewenangan pemangku kepentingan menentukan peluang pengelolaan kawasan konservasi
- P2 : Kewenangan pemangku kepentingan membuat rencana pengelolaan kawasan

- konservasi
 P3 : Kapasitas SDM yang ditugaskan oleh pemangku kepentingan pengelolaan kawasan konservasi
 P4 : Kontribusi pemangku kepentingan dalam menentukan kesesuaian antara kegiatan dengan standar yang bisa diterima dalam pengelolaan kawasan konservasi
 P5 : Keterlibatan pemangku kepentingan dalam mengelola produk dan jasa yang dihasilkan dalam pengelolaan kawasan konservasi

Analisis data Mengadopsi dari Roslinda *et al.*, 2012. Penetapan skoring dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk mengukur tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan, pengukuran data dengan menggunakan lima gradasi yang disajikan pada Tabel 6. Nilai skor dari lima pertanyaan dijumlahkan nilainya dipetakan kedalam bentuk matrik.

Tabel 6. Analisis Skoring Kepentingan dan Pengaruh

Skor	Nilai	Kriteria	Keterangan
<i>Tingkat Kepentingan Stakeholder</i>			
5	21-25	Sangat Tinggi	Sangat berkepentingan dalam pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak
4	16-20	Tinggi	Berkepentingan dalam pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak
3	11-15	Cukup Tinggi	Cukup berkepentingan dalam pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak
2	6-10	Kurang Tinggi	Kurang berkepentingan dalam pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak
1	0-5	Rendah	Tidak Berkepentingan dalam pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak
<i>Tingkat Pengaruh Stakeholder</i>			
5	21-25	Sangat Tinggi	Sangat berpengaruh dalam pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak
4	16-20	Tinggi	Berpengaruh dalam pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak
3	11-15	Cukup Tinggi	Cukup Berpengaruh Pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak
2	6-10	Kurang Tinggi	Kurang Berpengaruh dalam pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak
1	0-5	Rendah	Tidak Berpengaruh dalam pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak

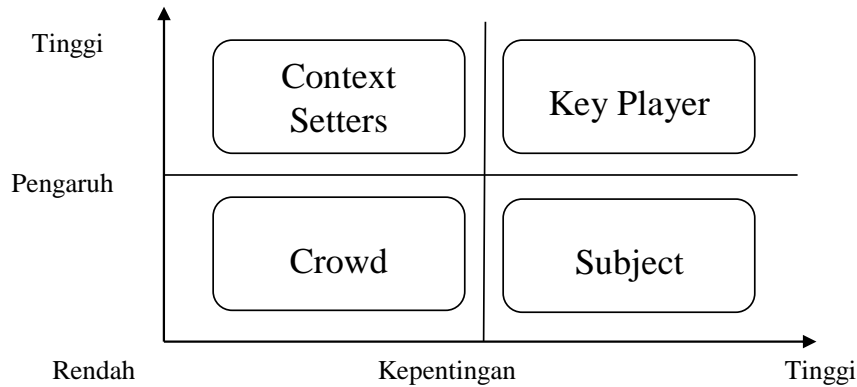
Sumber: Roslinda *et al.*, 2012

3. Analisis Klasifikasi

Merujuk kepada Reed et al. (2009), para pihak diklasifikasikan sebagai key player, context setter, subject, dan crowd. Penjelasan klasifikasi tersebut sebagai berikut:

- *Subjects* (Kuadran I) merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Namun dapat menjadi pengaruh jike membentuk aliansi dengan stakeholder lainnya.
- *Key players* (Kuadran II) merupakan stakeholder yang aktif karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek.

- *Crowd* (Kuadran III) merupakan stakeholder yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.
- *Context setters* (Kuadran IV) memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan, oleh karena itu mereka dapat menjadi resiko yang signifikan untuk harus dipantau.



Gambar 1. Kuadran Analisis Klasifikasi (Reed *et all*, 2009)

4. Pola Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak

Metode analisis data untuk mengetahui bagaimana pola pengelolaan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak tanpa adanya perlakuan atau manipulasi data pada setiap variable yang diteliti. Analisis pola pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak dengan merujuk pada Miles, Huberman & Saldana (2014), yang terdiri dari empat alur tahapan yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Misna (2015), kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, pengerucutan/pemfokusan, penyederhanaan, peringkasan dan transformasi data. Tahapan-tahapan secara lebih dapat dilihat pada penjelasan berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara dan pengumpulan data pendukung (studi pustaka). Dalam menganalisis, sebagian besar bergantung pada kemampuan peneliti untuk mengintegrasikan dan memahami data yang merupakan karakteristik umum dari semua jenis data tersebut. Dikarenakan data yang diperoleh jarang bersifat numerik, panjang, dan detail maka diperlukan interpretasi.

b. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang diperoleh dari catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian yang diuraikan berikut:

- Pemilihan (*Selection*)

Dalam pemilihan data, peneliti harus bertindak selektif atau menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan yang mungkin lebih bermakna dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis (Miles & Huberman, 2018)

- Pemfokusan (*Focusing*)

Memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis (Miles & Huberman, 2014). Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap seleksi atau pemilihan data. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian dan membatasi data yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah.

- Penyederhanaan (*Abstracting*)

Tahapan ini membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Data yang telah terkumpul kemudian dievaluasi khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan cakupan data.

- Penyederhanaan dan Transformasi Data (*Data Simplifying and Transforming*).

Pada tahap ini, data yang diperoleh selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara yaitu melalui seleksi yang ketat melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.

c. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan yang diambil. Melalui penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan cara memperdalam temuan tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan da mengecek ulang dengan bukti yang telah ditemukan di lapangan. Peneliti akan mengambil kesimpulan terkait pola pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak berdasarkan bukti, data dan juga temuan yang valid berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan Ekowisata Taman Wisata Alam Gunung Tunak

Menurut Maryono *et al.* (2005) dalam Handayani & Warsono (2017), *Stakeholders* dibagi menjadi 3 kategori yaitu *stakeholder* primer, kunci dan sekunder atau pendukung. Dari hasil identifikasi, *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan program kemitraan sebanyak enam aktor dengan bentuk keterlibatan masing-masing serta kategori *stakeholder* seperti yang disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Identifikasi *Stakeholder* dan Bentuk Keterlibatan serta Kategori *Stakeholder* dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak

Aktor	Bentuk Keterlibatan	Kategori
Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB)	1. Mengawasi dan Mendampingi segala bentuk kegiatan pengelolaan	<i>Stakeholder</i> Kunci
	2. Membantu pengambil keputusan dalam pengelolaan	
	3. Menyusun rencana pengelolaan jangka pendek, menengah dan panjang.	
	4. Mengurus izin jasa di dalam dan di luar kawasan	
	5. Melatih dan mengembangkan kapasitas masyarakat	
	6. Memberikan fasilitas dalam pengelolaan	
	7. Membantu dan memberikan anggaran	
Dinas Pariwisata	1. Memberikan fasilitas dalam pengelolaan	<i>Stakeholder</i>

Aktor	Bentuk Keterlibatan	Kategori
Kabupaten Tengah	Lombok 2. Memberikan anggaran dalam pembangunan akses	Sekunder atau Pendukung
Badan Pembangunan (Bappeda) Tengah	Perencanaan Daerah Lombok 1. Memberikan fasilitas dalam pengelolaan 2. Memberikan masukan dan saran dalam pengelolaan	Stakeholder Sekunder atau Pendukung
<i>Korea – Indonesia Forest Cooperation Center</i> (KIFC)	1. Memberikan fasilitas dalam pengelolaan 2. Menyusun perencanaan kerja (<i>Workplan</i>) 3. Memberikan pelatihan kepada masyarakat 4. Memberikan bantuan pendanaan 5. Membantu memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama kedua negara	Stakeholder Primer
Pemerintah Desa Mertak	1. Memberikan beberapa fasilitas pendukung dalam pengelolaan	Stakeholder Sekunder atau Pendukung
Kelompok Basopoq	Tunak 1. Membantu pengambil keputusan dalam pengelolaan 2. Memberikan fasilitas dalam pengelolaan 3. Membantu dan memberikan anggaran	Stakeholder Primer

Sumber: Data Primer, 2022.

1. Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB)

Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi. Salah satu kawasan yang masuk dalam pengelolaan BKSDA NTB adalah Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak. Balai Konservasi Sumber Daya Alam memiliki fungsi untuk menjaga dan mempertahankan flora dan fauna yang ada di dalam kawasan serta keutuhan kawasan dengan cara mengembangkan pariwisata. Banyak peran dari Balai Konservasi Sumber Daya dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak seperti membantu dalam pengambilan keputusan pengelolaan, mengawasi dan mendampingi segala bentuk kegiatan pengelolaan dengan menugaskan beberapa petugas. Selain itu juga berperan dalam menyusun perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk pengelolaan serta mengurus izin jasa di dalam maupun diluar kawasan dan juga memberikan fasilitas yang cukup dalam pengelolaan dan pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak.

2. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah

Dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak Dinas Pariwisata tidak memiliki peran yang banyak dan pengaruh. Dinas Pariwisata hanya berperan dalam memberikan fasilitas pendukung berupa pembuatan parkir, mushola, gazebo, sumur bor dan penataan landscape yang bergantung berdasarkan anggaran yang ada. Selain itu, Dinas Pariwisata memberikan dukungan anggaran pembangunan akses yang dilakukan hanya sekali.

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran yang sedikit sama halnya dengan Dinas Pariwisata. Hal ini dapat dilihat berdasarkan wawancara yang dilakukan yang menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah hanya berperan dalam memberikan masukan dan saran dalam pengelolaan serta memberikan fasilitas berupa amenities (toilet) serta anggaran untuk membangun jalan yang dilakukan hanya diawal pembangunan.

4. *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC)

Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) adalah organisasi di bawah *Korea Forest Service* (KFS) Republik Korea dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(KLHK) Republik Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan *Korea-Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC). Kerjasama kehutanan bersama Indonesia, serta untuk memfasilitasi dan memperkuat kerjasama kehutanan antara kedua Negara yang salah satunya adalah pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. *Korea-Indonesia Forest Cooperation Center* memiliki peran keterlibatan yang banyak dalam proses pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak yang bertujuan untuk memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama bilateral kedua negara antara lain memberikan 95% fasilitas untuk pengelolaan. Pemberian anggaran dana, membangun infrastruktur, *restaurant*, *guest house*, *butterfly zone* dan memberikan pelatihan kepada masyarakat merupakan bagian dari workplan yang disahkan dan dibuat *Korea-Indonesia Forest Cooperation Center* yang dijalankan secara bertahap berdasarkan proyek proposal.

5. Pemerintah Desa Mertak

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Mertak kurang memiliki peran dan keterlibatan penting dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya program dan anggaran dana yang diberikan terkait pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Akan tetapi Pemerintah Desa Mertak memberikan beberapa fasilitas pendukung dalam pengelolaan dan mengharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar hutan serta mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

6. Kelompok Masyarakat Tunak Basopoq

Dalam melaksanakan kerjasama, Kelompok Tunak Basopo memiliki keterlibatan dalam pengelolaan yaitu melakukan kerjasama dengan para *stakeholder* yang ada untuk menjaga kelestarian hutan dan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok Tunak Basopo berperan dalam membantu pengambilan keputusan dan menyampaikan ide serta gagasan dalam pengelolaan seperti penjualan jasa wisata (*guiding*) meskipun tidak terlalu besar karena masih dibawah wewenang BKSDA NTB. Memberikan kontribusi berupa pembangunan *restaurant*, toilet, listrik, air, parkir, mushola maupun penambahan atraksi wisata serta memberikan dukungan anggaran yang diperuntukkan untuk mendukung kegiatan serta pembangunan berkelanjutan kawasan. Hasil anggaran didapatkan dari hasil penjualan paket wisata, *restaurant* dan *guiding*.

Berdasarkan peran masing-masing aktor disajikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Peran *Stakeholder* dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak

Pelaksana	Koordinator	Peran		
		Fasilitator	Implementer	Akselerator
BKSDA	BKSDA	BKSDA	BKSDA	BKSDA
-	-	DISPAR	-	-
-	-	LOTENG	-	-
-	-	BAPPEDA	-	-
-	-	LOTENG	-	-
-	-	KIFC	KIFC	KIFC
-	-	KM TB	KM TB	-
-	-	PDM	-	-

Sumber: Data Primer, 2022

Keterangan:

- BKSDA : Balai Konservasi Sumber Daya Alam
- DISPAR LOTENG : Dinas Pariwisata Lombok Tengah
- BAPPEDA LOTENG : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah

KIFC	: <i>Korea – Indonesia Forest Cooperation Center</i>
KM TB	: Kelompok Masyarakat Tunak Basopoq
PDM	: Pemerintah Desa Mertak

Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak

Stakeholder adalah orang-orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam suatu sistem. Setiap aktor yang terlibat dalam program kemitraan ini memiliki nilai tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda yang dapat dilihat pada Tabel 8 dan Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Tingkat Kepentingan Stakeholder dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak.

No	Pemangku Kepentingan	Kepentingan					Nilai
		K1	K2	K3	K4	K5	
1	Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB)	5	5	4	5	5	24
2	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah	5	1	1	4	1	12
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah	5	1	3	4	1	14
4	<i>Korea – Indonesia Forest Cooperation Center</i> (KIFC)	5	4	5	5	5	24
5	Pemerintah Desa Mertak	5	1	1	2	1	10
6	Kelompok Masyarakat Tunak Basopoq	5	5	4	5	1	20

Sumber : Data Primer (2022)

Keterangan :

K1 = Persepsi pentingnya pelaksanaan kemitraan konservasi;

K2 = Keterlibatan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan kemitraan konservasi;

K3 = Program pemangku kepentingan terkait pelaksanaan kemitraan konservasi;

K4 = Manfaat kemitraan konservasi bagi pemangku kepentingan;

K5 = Ketergantungan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan kemitraan konservasi.

Pada Tabel 9 dapat dilihat bahwa dari jumlah aktor-aktor yang dilakukan wawancara mengenai pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tunak memiliki masing-masing bentuk persepsi, keterlibatan, program, manfaat dan ketergantungan yang diterima oleh masing-masing aktor. Untuk mengetahui secara detail mengenai tingkat kepentingan masing-masing aktor yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 9 di atas.

Berdasarkan hasil dari analisis kepentingan dari masing-masing aktor, diketahui bahwa dalam pengelolaan selama ini, Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) dan *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) memiliki kepentingan dengan kriteria sangat tinggi dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Olat Gunung Tunak. Tingkat kepentingan dari Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) dan *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) memiliki nilai skor 24. Hal ini didasari oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada informan Tenaga Ahli dan Manager Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) yang menyebutkan bahwa Taman Wisata Alam merupakan kawasan yang dimiliki oleh Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) yang berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan potensi yang ada di dalam kawasan seperti pengembangan pariwisata. Dari segi keterlibatan, Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) sangat terlibat dalam pengelolaan dengan bentuk keterlibatan berupa pembuatan SK yang berisi izin pemanfaatan jasa

baik di dalam maupun di luar kawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) diketahui bahwa pelaksanaan kerjasama ini mencakup hubungan antara Korea dan Indonesia. *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) dari segi keterlibatan termasuk dalam kategori terlibat dengan bentuk keterlibatan dan program berupa fasilitas outdoor, infrastruktur, *restaurant*, *guest house*, *butterfly zone*, penyusunan rencana kerja (*workplan*), pelatihan pada masyarakat dan memberikan bantuan anggaran dana dengan jangkauan program yaitu masyarakat, kedua Negara dan wisatawan. Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak memberikan manfaat untuk *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) berupa *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama bilateral kedua Negara dalam bentuk kerjasama dengan jangkauan manfaat yaitu Indonesia dan Korea serta Masyarakat.

Pemerintah Desa Mertak merupakan aktor dengan kriteria tingkat kepentingan kurang tinggi atau kurang penting dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak dengan nilai skor 10. Ini dikarenakan Pemerintah Desa Mertak tidak memiliki keterlibatan maupun program terkait dengan pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak, selain itu kurangnya manfaat yang diterima oleh Pemerintah desa dan tidak memiliki ketergantungan terkait pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Pemerintah Desa Mertak hanya mengharapkan dengan adanya kerjasama dengan masyarakat desa dapat membantu perekonomian serta pengembangan potensi sumber daya manusia masyarakat.

Tabel 10. Tingkat Pengaruh Stakeholder dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak

No	Pemangku Kepentingan	Pengaruh					Nilai
		P1	P2	P3	P4	P5	
1	Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB)	5	5	3	4	4	21
2	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah	1	5	1	3	1	11
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah	4	3	1	1	5	14
4	<i>Korea – Indonesia Forest Cooperation Center</i> (KIFC)	5	5	4	5	5	24
5	Pemerintah Desa Mertak	1	1	3	1	1	7
6	Kelompok Masyarakat Tunak Basopog	4	3	3	3	3	16

Sumber : Data Primer (2022)

Keterangan :

P1= Kemampuan pemangku kepentingan memperjuangkan aspirasinya terkait kerjasama.

P2 = Kontribusi fasilitas yang diberikan oleh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan kerjasama.

P3= Kapasitas kelembagaan/ SDM yang ditugaskan oleh pemangku kepentingan terkait kerjasama.

P4 = Dukungan anggaran pemangku kepentingan yang digunakan untuk kerjasama.

P5 = Kebutuhan kerja sama dalam pelaksanaan kerjasama.

Berdasarkan hasil dari analisis pengaruh dari masing-masing *stakeholder*, diketahui bahwa dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak, Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) dan *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) memiliki pengaruh dengan kriteria sangat tinggi dalam pengelolaan Taman Wisata Alam

Gunung Tunak. Tingkat pengaruh dari Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat memiliki nilai skor 21 sedangkan *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) memiliki nilai skor 24. Hal ini didasari oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada informan Tenaga Ahli dan Manager Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat yang mengatakan bahwa informan Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat sangat berwenang dalam pengambilan keputusan menyampaikan ide dan gagasan, berwenang dalam menyusun perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang terkait pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak yang berdasar pada SK yang telah ditetapkan. Selain itu juga memberikan kontribusi fasilitas berupa gedung, kamar hotel dan restoran yang dibangun oleh anggaran Negara maupun dana pihak ketiga yang dihibahkan ke negara yang tetap dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) diketahui bahwa *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* sangat berwenang dalam pengambilan keputusan, menyampaikan ide dan gagasan terkait pelaksanaan kerjasama. Adapun pengaruh dari segi kontribusi fasilitas dikatakan sangat banyak dimana semua fasilitas yang ada di Taman Wisata Alam Gunung Tunak 95% merupakan fasilitas yang telah diberikan oleh *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center*. Dalam mendukung terlaksananya kerjasama telah ada SDM yang telah ditugaskan secara khusus untuk mengawal setiap proses yang dilakukan berjumlah 5 orang. Selain itu dukungan anggaran juga telah diberikan sebesar 4.000.000 USD atau senilai Rp. 60 miliar yang diperuntukkan untuk semua rencana kerja (*workplan*) yang telah disahkan dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan proyek proposal.

Pemerintah Desa Mertak merupakan aktor dengan kriteria tingkat pengaruh kurang tinggi atau kurang berpengaruh dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak dengan nilai skor 7. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa dari segi aspirasi, Pemerintah Desa Mertak sama sekali tidak berwenang dalam pengambilan keputusan, menyampaikan ide dan gagasan terkait pelaksanaan kerjasama sama halnya dari segi fasilitas yang diketahui tidak ada kontribusi apapun. Akan tetapi dari segi SDM terbilang cukup meskipun tidak banyak berpengaruh. Tidak adanya anggaran yang diberikan menjadi kriteria penentu rendahnya pengaruh Pemerintah Desa Mertak.

Adapun klasifikasi aktor-aktor dalam kepentingan dan pengaruh yang terlibat dalam pengembangan kerja sama pengelolaan kawasan dapat dilihat pada Tabel 11 dan Gambar 2 sebagai berikut:

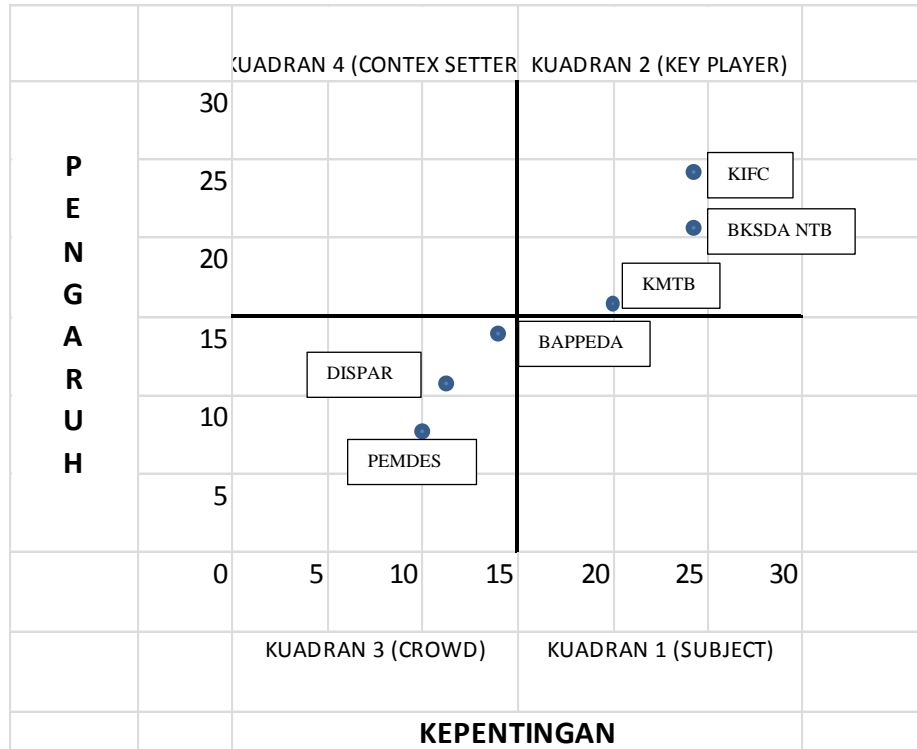
Tabel 11. Klasifikasi aktor dalam kepentingan dan pengaruh

No	Klasifikasi	Aktor/Stakeholder
1	K1 Subject	-
2	K2 Key Player	Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) <i>Korea – Indonesia Forest Cooperation Center</i> (KIFC) Kelompok Masyarakat Tunak Basopoq (KMTB)
3	K3 Contex Setter	-
4	K4 Crowd	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah (BAPPEDA) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah (DISPAR) Pemerintah Desa Mertak (PEMDES)

Sumber : Data Primer, 2022

Tabel 12. Nilai kepentingan dan pengaruh *stakeholder*

No	Pemangku Kepentingan	Nilai	
		Kepentingan	Pengaruh
1	BKSDA NTB	24	21
2	DISPAR	12	11
3	BAPPEDA	14	14
4	KIFC	24	24
5	PEMDES	10	7
6	KMTB	20	16



Gambar 2. Kuadran Klasifikasi aktor dalam kepentingan dan pengaruh

Berdasarkan Gambar 2 matriks kuadran klasifikasi aktor dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak dapat diketahui bahwa klasifikasi aktor terbagi dalam 2 kuadran yaitu kuadran II (*key player*) dan kuadran III (*crowd*). Pada keenam pihak mitra yang terlibat, diketahui bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB), *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) dan Kelompok Masyarakat Tunak Besopoq masuk dalam kategori *key player*, dimana kategori ini menunjukkan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB), *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) dan Kelompok Masyarakat Tunak Besopoq memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam hal kewenangan dan tanggungjawab yang besar serta menjadi pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan program kerjasama ini. Ketiga aktor ini masuk dalam kategori *key player* didasarkan pada nilai kepentingan dan pengaruh yang diperoleh seperti yang tercantum pada Tabel 4.6 yang mengacu pada analisis skoring kepentingan dan pengaruh seperti yang tercantum pada Tabel 3.5 yang menyatakan bahwa skor 16 – 20 memiliki kriteria berkepentingan dan berpengaruh dalam pengelolaan Taman Wisata

Alam Gunung Tunak dan skor 21 – 25 memiliki kriteria sangat berkepentingan dan sangat berpengaruh dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Menurut Kuswandono (2010), *key player* memiliki pengaruh yang cukup besar dalam suksesnya suatu kegiatan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Kuadran *crowd* merupakan *stakeholder* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Aktor yang termasuk dalam kuadran ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Desa Mertak. Ini disebabkan karena ketiga *stakeholder* ini tidak memiliki ketergantungan pada kerjasama ini, hal tersebut bisa dilihat dari tidak adanya program yang berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan. Dari segi pengaruhpun ketiga *stakeholder* ini tergolong sangat rendah. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan disebabkan oleh kurangnya peran dari ketiga aktor ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa para pihak pada posisi *key players* lebih banyak terlibat dibandingkan para pihak yang terdapat pada posisi *crowd* (Nugroho, 2016). Lastiantoro & Cahyono, (2015) menyebutkan bahwa tugas utama dan fungsi para aktor akan menentukan besarnya pengaruh dan kepentingan lembaga.

Dari pembahasan diatas diketahui bahwa pada masing-masing pemangku kepentingan memiliki hubungan berdasarkan kuadran yang ditempati. Pada kuadran II yaitu *key players* diketahui bahwa ada tiga pemangku kepentingan yang mengisinya yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB), *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) dan Kelompok Masyarakat Tunak Besopoq. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa ketiga pihak ini memiliki hubungan kerjasama dan saling mengisi dalam proses penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM masyarakat sekitar kawasan. Ketiga pihak mitra ini merupakan *stakeholder* kunci atau pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap sumberdaya dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Selain itu, ketiga pihak mitra ini dalam pola pengelolaan termasuk sebagai fasilitator antara masyarakat dan Taman Wisata Alam, investor dalam penyusunan pendanaan, dan sebagai evaluator dari hasil kerjasama. Sedangkan untuk kuadran III (*crowd*) yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Desa Mertak memiliki hubungan dalam pengelolaan hanya sebagai *stakeholder* pendukung atau pihak yang memiliki kepentingan secara tidak langsung atau pihak yang hanya bergantung pada sebagian sumberdaya yang ada dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak.

Berdasarkan Gambar 2 matriks kuadran klasifikasi aktor dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak dapat diketahui bahwa klasifikasi aktor terbagi dalam 2 kuadran yaitu kuadran II (*key player*) dan kuadran III (*crowd*). Pada keenam pihak mitra yang terlibat, diketahui bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB), *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) dan Kelompok Masyarakat Tunak Besopoq masuk dalam kategori *key player*, dimana kategori ini menunjukkan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB), *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) dan Kelompok Masyarakat Tunak Besopoq memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam hal kewenangan dan tanggungjawab yang besar serta menjadi pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan program kerjasama ini. Menurut Kuswandono (2010), *key player* memiliki pengaruh yang cukup besar dalam suksesnya suatu kegiatan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Kuadran *crowd* merupakan stakeholder yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Aktor yang termasuk dalam kuadran ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Desa Mertak. Ini disebabkan karena ketiga *stakeholder* ini tidak memiliki ketergantungan pada kerjasama ini, hal tersebut bisa dilihat dari tidak adanya program yang berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan. Dari segi pengaruhpun ketiga *stakeholder* ini tergolong sangat rendah. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk mengikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa para pihak pada posisi *key players* lebih banyak terlibat dibandingkan para pihak yang terdapat pada posisi *crowd* (Nugroho, 2016). Lastiantoro & Cahyono, (2015) menegaskan bahwa tugas pokok dan fungsi para pihak menentukan besarnya pengaruh dan kepentingan institusi.

Dari pembahasan diatas diketahui bahwa pada masing-masing pemangku kepentingan memiliki hubungan berdasarkan kuadran yang ditempati. Pada kuadran II yaitu *key players* diketahui bahwa ada tiga pemangku kepentingan yang mengisinya yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB), *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) dan Kelompok Masyarakat Tunak Besopoq. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa ketiga pihak ini memiliki hubungan kerjasama dan saling mengisi dalam proses penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM masyarakat sekitar kawasan. Ketiga pihak mitra ini merupakan satakeholder kunci atau pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap sumberdaya dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Selain itu, ketiga pihak mitra ini dalam pola pengelolaan termasuk sebagai fasilitator antara masyarakat dan Taman Wisata Alam, investor dalam penyusunan pendanaan, dan sebagai evaluator dari hasil kerjasama. Sedangkan untuk kuadran III (*crowd*) yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Desa Mertak memiliki hubungan dalam pengelolaan hanya sebagai stakeholder pendukung atau pihak yang memiliki kepentingan secara tidak langsung atau pihak yang hanya bergantung pada sebagian sumberdaya yang ada dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak.

Pola Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak

Pelaksanaan kerjasama antar *stakeholder* dalam pengembangan kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tunak menggunakan lima variabel untuk menentukan pola kemitraannya. Berikut hasil rekapitulasi data yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Rekapitulasi Pola Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak

Variabel	Indikator	Pernyataan
Perencanaan	a. Dokumen perencanaan kawasan	a. Dokumen perencanaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak (BKSDA NTB)
	b. Tahapan penyusunan perencanaan	b. Berdasarkan peraturan yang berlaku
	c. Lama perencanaan	c. RPHJP 10 Tahun dan Rencana Kerja Tahunan, Pembuatan SK yang berisi izin pemanfaatan jasa baik di dalam maupun di luar kawasan
	d. Keterlibatan aktor dalam perencanaan kawasan	d. Aktor yang terlibat secara menyeluruh adalah BKSDA, KIFC dan KM Tunaq Basopoq
Investasi	a. Sumber anggaran	a. Anggaran dari BKSDA dan KIFC
	b. Keterlibatan aktor dalam pembiayaan	b. BKSDA, KIFC, DISPAR Lombok Tengah, BAPPEDA Lombok Tengah, PEMDES Mertak dan

Variabel	Indikator	Pernyataan
Pelaksanaan	c. Jenis-jenis investasi	KM Tunaq Basopoq
	d. Besar investasi yang diberikan	c. Investasi berupa anggaran pendanaan (BKSDA dan KIFC) dan fasilitas penunjang (BKSDA, KIFC, DISPAR Lombok Tengah, BAPPEDA Lombok Tengah, PEMDES Mertak dan KM Tunaq Basopoq). d. Anggaran pendanaan sebesar 4.000.000 USD atau Rp. 60 miliar
	a. Adanya organisasi kelompok masyarakat	a. Kelompok Masyarakat Tunaq Basopoq
	b. Keterlibatan aktor dalam pelaksanaan	b. Balai KSDA, <i>Korea – Indonesia Forest Cooperation Center</i> (KIFC) dan Kelompok Masyarakat Tunaq Besopoq
Pengelolaan	c. Jenis-jenis pelaksanaan	c. Menjaga dan mempertahankan potensi yang ada di dalam kawasan (BKSDA), memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama bilateral kedua Negara dalam bentuk kerjasama dengan jangkauan manfaat yaitu Indonesia dan Korea serta Masyarakat (KIFC). Menyumbangkan Tenaga SDM dan menyediakan fasilitas penunjang kawasan.
	a. Kolaborasi dengan pihak lain	a. Korea – Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC)
	b. Keterlibatan aktor dalam pengelolaan	b. Balai KSDA, <i>Korea – Indonesia Forest Cooperation Center</i> (KIFC) dan Kelompok Masyarakat Tunaq Besopoq
Evaluasi	c. Jenis program pengelolaan	c. Menyediakan fasilitas berupa gedung, kamar hotel, <i>butterfly zone</i> dan restoran, Tenaga SDM, Pelatihan masyarakat
	a. Materi yang di evaluasi	a. Laporan hasil kegiatan, pendapatan dan PNBP dari hasil pengelolaan jasa wisata yang ada di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tunak
	b. Waktu evaluasi	b. Mingguan, bulanan dan Tahunan
	c. Keterlibatan aktor dalam evaluasi	c. Balai KSDA, <i>Korea – Indonesia Forest Cooperation Center</i> (KIFC) dan Kelompok Masyarakat Tunaq Besopoq

Sumber : Data Primer, 2022

1. Keterlibatan Dalam Perencanaan

Dalam memulai suatu kegiatan, sebuah kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan untuk pengembangan wisata sebenarnya sangat membutuhkan strategi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan. Kurniawan (2022), tindakan memilih atau menetapkan tujuan organisasi dikenal dengan perencanaan. Perencanaan kemudian melibatkan penentuan kebijakan proyek, rencana, proses, teknik, sistem anggaran dan standar yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ada.

Pengelola Taman Wisata Alam Gunung Tunak yaitu Balai KSDA NTB sejauh ini sudah memiliki perencanaan terkait pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Beberapa hal yang dilakukan adalah penyusunan dokumen perencanaan RPHJP periode 2016-2025 dan pembuatan SK yang berisi izin pemanfaatan jasa baik di dalam maupun di luar kawasan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sejauh ini hanya ada tiga aktor yang terlibat secara menyeluruh dalam perencanaan pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak yaitu Balai KSDA NTB, *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) dan Kelompok Masyarakat Tunaq Basopoq.

2. Keterlibatan Sebagai Investor

Menurut Rustandi (2022), investor merupakan sebuah proses menanamkan modal dalam jangka waktu tertentu, yaitu dalam bentuk sejumlah pengeluaran di awal dan pengeluaran yang secara periodik perlu dipersiapkan. Berdasarkan hasil wawancara, dalam penelitian ini semua aktor yang terlibat ikut andil dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak baik dalam bentuk anggaran pendanaan (uang) maupun fasilitas-fasilitas pendukung. *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) merupakan aktor yang memberikan bantuan pendanaan yang besar dalam bentuk uang senilai 4.000.000 USD atau Rp. 60 miliar dan 95% fasilitas yang ada di Taman Wisata Alam Gunung Tunak merupakan investasi dari KIFC seperti fasilitas outdoor, infrastruktur, *restaurant*, *guest house*, dan *butterfly zone*. Kemudian dari aktor yang lain diberikan investasi berupa fasilitas-fasilitas pendukung seperti pembuatan parkir, mushola, gazebo, sumbu bor, toilet, dan penataan landscape. Menurut Asih *et al.* (2021), dalam sector pengembangan dan pengelolaan wisata tentunya tidak akan pernah lepas dari investasi.

3. Keterlibatan Sebagai Pelaksana

Pada dasarnya, pelaksanaan merupakan usaha yang dilakukan guna melaksanakan sebuah perencanaan dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi berbagai kebutuhan yang dibutuhkan, tim pelaksana, tempat dan waktu pelaksanaannya (Murtikasari, 2021). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, semua aktor telah terlibat dalam pelaksanaan terkait penunjang fasilitas. Namun dalam hal pelaksanaan pengelolaan hanya Balai KSDA, *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) dan Kelompok Masyarakat Tunaq Besopoq yang menjadi pelaksana setiap kegiatan pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Hal ini disebabkan karena Balai KSDA memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama bilateral kedua Negara dalam bentuk kerjasama dengan jangkauan manfaat yaitu Indonesia dan Korea serta Masyarakat (KIFC). Kemudian KIFC sebagai penyumbang dana dan fasilitas terbanyak dan menjadi perwakilan dari Korea. Sedangkan Kelompok Masyarakat Tunaq Besopoq menjadi perantara pihak Balai KSDA, *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) dengan masyarakat. Dalam proses pelaksanaan, tiap aktor telah memberikan perwakilan tenaga SDM untuk membantu kegiatan dan program yang dilakukan. Beberapa keterlibatan sebagai pelaksana yaitu menyediakan jasa penginapan seperti hotel, menyediakan wisata pengamatan kupu-kupu dan restoran. Selain itu, tenaga SDM yang disediakan juga terlibat dalam penjagaan dan perlindungan kawasan.

4. Keterlibatan Sebagai Pengelola

Mali (2021), keberhasilan pengelolaan ekowisata membutuhkan kerjasama para pemangku kepentingan baik itu pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat di tingkat local, regional dan nasional. Untuk meningkatkan efektivitas pengembangan wisata perlu dilakukannya pengelolaan secara kolaboratif, sinkronisasi program kegiatan antar pemangku kepentingan serta saling bersinergi (Widodo *et al.*, 2018). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa Balai KSDA, *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) dan Kelompok Masyarakat Tunaq Besopoq merupakan aktor yang paling terlibat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Hal ini dapat dilihat dari nilai keterlibatan aktor yang menunjukkan nilai sangat tinggi. Bentuk pengelolaan yang dilakukan yaitu berupa pembuatan zona pengamatan kupu-kupu, *guest house*, *restaurant*, dan memberikan skema pemberdayaan dan pelatihan masyarakat sekitar.

5. Keterlibatan Sebagai Evaluator

Evaluasi merupakan sebuah praktik penilaian terhadap sebuah suatu kinerja untuk menentukan nilai dan manfaat dalam waktu tertentu dengan perbandingan kinerja yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa pihak utama yang melaksanakan kegiatan evaluasi adalah Balai KSDA, Korea – Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) dan Kelompok Masyarakat Tunaq Besopq. Hal ini didasari dari keterlibatan ketiga aktor ini mulai dari tahap perencanaan, investasi, pelaksanaan dan pengelolaan yang sangat tinggi dan intens. Bentuk evaluasi yang dilakukan berupa laporan dari hasil kegiatan yang telah dilakukan, pendapatan yang diperoleh dari berbagai atraksi serta pengelolaan jasa wisata yang ada di Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Kegiatan evaluasi akan dilakukan setiap selesai kegiatan. Namun pada umumnya, kegiatan evaluasi diadakan pada saat laporan mingguan, bulanan dan tahunan.

Berdasarkan wawancara dan bentuk keterlibatan setiap aktor, diketahui bahwa pola pengelolaan yang dikembangkan oleh para aktor ada tiga yaitu pola partisipasi komunitas, pola partnership atau kemitraan dan pola pengembangan kapasitas lokal.

1. Pola Partisipasi Komunitas

Pada pola pengelolaan ini, masyarakat secara aktif mengambil bagian dalam pengelolaan kawasan wisata. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masyarakat memiliki kewenangan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tunaq. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya Kelompok Masyarakat Tunaq Basopq yang menjadi perwakilan masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk menghubungkan pihak mitra dengan masyarakat lokal dan memberikan bantuan dalam memberdayakan kapasitas masyarakat.

2. Pola Partnership dengan pihak eksternal

Pada pola pengelolaan ini, pihak pengelola kawasan berkolaborasi dengan pemerintah kota atau daerah dan organisasi non-pemerintah (LSM). Dalam pengelolaan suatu kawasan wisata tentunya diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah, swasta dan juga masyarakat (Putra, 2013). Tujuan dari pola kemitraan ini adalah untuk mengembangkan kawasan wisata, memberdayakan masyarakat lokal dan mengimplementasikan kegiatan pengelolaan wisata yang ada di Taman Wisata Alam Gunung Tunaq. Berdasarkan hasil wawancara, bentuk-bentuk dari pola pengelolaan kemitraan yang didapatkan terdiri dari adanya penyusunan rencana kerja jangka panjang (RPHJP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), adanya pemberian investasi berupa uang dan fasilitas dari pendukung dari para aktor yang utamanya diperoleh dari KIFC. Kemudian adanya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan yang merupakan tujuan dari dibentuknya kerjasama antara BKSDA NTB dengan KIFC dan adanya hubungan kerja antar Negara yaitu Korea dengan Indonesia memperkuat alasan bahwa pola yang dibentuk adalah pola kemitraan.

3. Pola Pengembangan Kapasitas Lokal

Pola ini memiliki tujuan untuk mendidik dan mempersiapkan masyarakat lokal atau setempat guna mengelola dan melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan. Menurut Syafikri *et al.* (2019), program pengembangan kapasitas lokal dalam pengelolaan kawasan tentu akan mampu melayani masyarakat lokal dan berdampak baik bagi pelestarian lingkungan kawasan, ekonomi berkelanjutan dan keberlanjutan sosial. Maka dari itu keterlibatan pihak-pihak aktor sangat penting untuk membantu memberdayakan masyarakat untuk pengelolaan kawasan wisata yang ada di Taman Wisata Alam Gunung Tunak sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pihak aktor yang terlibat yaitu KIFC memiliki salah satu program yaitu memberdayakan

masyarakat lokal atau sekitar bersama dengan BKSDA dan Kelompok Masyarakat Tunaq Besopoq melalui program pelatihan guna meningkatkan kualitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan wisata yang ada di Taman Wisata Alam Gunung Tunak.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB), Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah, *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC), Pemerintah Desa Mertak dan Kelompok Tunak Besopoq.
2. Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) dan *Korea – Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) memiliki nilai kepentingan masing-masing sebesar 24 dan pengaruh masing-masing sebesar 21 dan 24 dengan kriteria sangat tinggi dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Kelompok Tunaq Besopoq memiliki kepentingan sebesar 24 dan pengaruh sebesar 16 dengan kriteria tinggi. Sedangkan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah memiliki nilai kepentingan masing-masing sebesar 12 dan 14 kemudian nilai pengaruh masing-masing sebesar 11 dan 14 dengan kriteria cukup tinggi. Untuk Pemerintah Desa Mertak memiliki nilai kepentingan sebesar 10 dan pengaruh sebesar 7 dengan kriteria kurang tinggi.
3. Pola pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tunak bahwa pola pengelolaan yang dikembangkan oleh para aktor ada tiga yaitu pola partisipasi komunitas, pola partnership atau kemitraan dan pola pengembangan kapasitas lokal yang mengacu pada 5 aspek yaitu perencanaan, investasi, pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalyah, R., Hamid, D., & Hakim, L. (2016). Peran *Stakeholder* Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 37(1), 158- 163.
- Asih, S., Ratnawati, N. S., Wirawan, I. W. 2021. Kebijakan Investasi Asing dalam Pengembangan Pariwisata yang Berbasis Desa Adat di Provinsi Bali. *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*, 1(2), 81-90.
- Beaumont., N. 2011. The third criterion of ecotourism: are ecotourism more concerded about sustainability than other tourists. *Journal of Ecotourism* 10(2)
- Halim, C., Nugroho, N., & Hutabarat, F. A. M. (2019). Analisis Komunikasi Di PT. Asuransi Buana Independent Medan. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 3(1).
- Handayani, F., Warsono, H. 2017. Analisis Peran *Stakeholders* Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 40–53.
- Mali, M. G. 2021. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Era New Normal di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Aplikasi Visiting Jogja. *Destina: Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata*, 3(2), 1-11.
- Menteri Kehutanan. 2017. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem No. 12 Tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Jakarta.
- Murtikasari, R. A. 2021. Pengembangan Kampung Wisata Melalui Pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) di Kampung Heritage Kayutangan, Kota Malang. UPN”Veteran” Jatim.
- Presiden Republik Indonesia. 1990. Undang – Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta.
- Putra, A. S. 2013. Pola Kemitraan Pariwisata Dalam Manajemen Atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 5(3), 189-200.
- Reed M, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Hubacek K, Morris J, Prell C, Quinn CH, Stringer LC. 2009. Who’s Nad Why ? A Typology of *Stakeholder* Analysis Methods for Natural Resource Management. *Journal of Environmental Management*, 90, 1933-1949.
- Roslinda, E., Darusman,, D., Suharjito,, D., & Nurrochmat, , D. (2012). Analisis Pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. *Manajemen Hutan Tropika XVIII*.
- Rukajat, A. 2018. Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach. Yogyakarta: Deepublish.
- Rustandi, C. 2022. Pengaruh Investasi Swasta, Investasi Pemerintah, Kinerja Ekspor, dan Kinerja Impor Terhadap Pertumbuhan Industri Manufaktur dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Kebijakan Fiskal Sebagai Variabel Moderasi. Universitas 17 Agustus Suporahardjo, editor. 2005. *Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus*. Penerjemah: Assagaf M, Trajudi D, Sileuw I, Djatmiko WA, Sumarno A. Bogor: Pustaka Latin. Terjemahan dari: berbagai artikel dan berbagai sumber.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

- Syafikri, D., Nurwahidah, S., Kautsari, N. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Konservasi Kramat, Bedil, dan Temudong Melalui Pengembangan Ekowisata Bahari dan Budi Daya Rumput Laut. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 1-10.
- Widodo, M. L., Soekmadi, R., Arifin, H. S. 2018. Analisis *Stakeholders* Dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 8(1), 55-61.